

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERHADAP KOREA UTARA

Perang Korea yang terjadi di tahun 1950 hingga 1953 telah menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Krisis di semenanjung Korea semakin memburuk akibat adanya pengembangan nuklir Korea Utara. Sejak masa perang dingin, persoalan semenanjung Korea memang bukan hanya jantung dari keamanan di Asia Timur. Semenanjung Korea juga merupakan masalah dari keamanan global. Oleh karena itu, baik negara-negara di kawasan Asia Timur hingga organisasi internasional turut ikut andil dalam penyelesaian masalah semenanjung Korea. Korea Selatan sebagai salah satu negara yang terletak di semenanjung ini pun selalu mempunyai kebijakan luar negeri untuk Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan dari waktu ke waktu mencoba untuk mengeluarkan kebijakan yang berguna untuk reunifikasi, perdamaian, dan denuklirisasi Korea Utara. Pada bab ini penulis akan menguraikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Korea Selatan terhadap Korea Utara sejak Korea di pimpin oleh pemimpin yang otoriter sampai masa pemerintahan sipil. Pada bab ini juga akan menguraikan kendala - kendala yang menyebabkan tidak berhasilnya kebijakan Korea Selatan sehingga krisis semenanjung Korea masih berlangsung hingga saat ini.

A. Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara beserta Reaksi Korea Utara

1. Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara Di Masa Otoriter (1948-1987).

Pada awal pemerintahan sejak terbentuknya Republik Korea, Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dijalankan dibawah kepemimpinan yang otoriter. Perang Korea yang terjadi di tahun 1950-1953 di akibatkan karena perbedaan ideologi di antara kedua Korea. Korea Utara mempunyai ideologi sosialis komunis yang memiliki kebijakan *One Policy* dalam menjalankan pemerintahannya. *One Policy* merupakan keinginan untuk meng-komuniskan seluruh semenanjung Korea dengan kekuatan militer.²² Sedangkan Korea Selatan dibawah payung Amerika mempunyai ideologi liberal demokrasi. Korea Selatan ingin Korea Utara bergabung menjadi satu dengan pemerintahan anti komunisme. Setelah tiga tahun berperang, kedua Korea akhirnya setuju untuk menandatangani gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Gencatan senjata itu menandakan berakhirnya perang Korea. Perang Korea telah berakhir bukan berarti masalah diantara kedua nya selesai. Sampai sekarang, Kedua Korea belum menandatangani perjanjian damai sehingga secara tidak langsung kedua negara masih dalam keadaan perang.²³ Setelah perang Korea berakhir, Korea Selatan dan sekutunya

²² *Peace and Cooperation: White Paper on Korean Unification*, 1996 (diakses pada: 7 November 2014); tersedia di <http://eng.unikorea.go.kr>, hal. 29

Amerika Serikat melakukan kerjasama pertahanan di tahun 1953. Sedangkan Korea Utara mendapat dukungan penuh dari Uni Soviet dan China.

Dalam Konferensi Geneva (26 April - 15 Juni 1954) yang membahas mengenai perpecahan politis di Korea, Rhee Syngman menuntut adanya pemilu di Korea Utara dibawah pengawasan PBB untuk mengisi sepertiga kursi DPR Republik Korea dan mengenai keinginan Seoul agar pasukan militer Cina harus sudah ditarik seluruhnya dari Korea selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan pemilu tersebut. namun tuntutan itu ditolak Korea Utara dan sekutu komunisnya. Pihak Korea Utara menginginkan adanya komisi seluruh Korea yang mengatur pemilu Korea dibawah pengawasan kelompok negara netral bukan PBB.²⁴ Pada akhirnya, Kim Il Sung sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara kala itu tetap menerapkan kebijakan reunifikasi dibawah ideologi Komunisme, sedangkan Rhee Syngman yang merupakan pemimpin pertama Korea Selatan menerapkan kebijakan reunifikasi anti komunisme.²⁵

Pada tahun 1962, Korea Selatan berada dibawah kepemimpinan Presiden Park Chung Hee lebih memprioritaskan pada pembangunan ekonomi rakyat. Korea Selatan mulai mampu menunjukkan kemajuan ekonominya dengan kebijakan *Saemaul Undong* yang dibuat oleh presiden Park. Mengenai isu reunifikasi Korea, Presiden Park Chung Hee masih menerapkan kebijakan anti komunisme seperti para pemimpin

²⁴ Yang, Seung Yoon dan Mochtar Mas'oed, *Politik luar negeri korea selatan*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2004) hal.32

²⁵ *Ibid.*,

terdahulunya. Walaupun begitu, Korea Selatan tetap mencoba untuk menggunakan dialog dan negosiasi untuk mencapai kebijakan unifikasi Korea. Namun, Korea Utara menganggap pemerintahan Korea Selatan mencoba untuk memisahkan dan mengganggu masyarakat Korea. Korea Utara masih tidak menyerah bermaksud untuk meng-komunikasikan seluruh semenanjung Korea dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan. Sedangkan untuk hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat pada saat itu hanya terkait untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan militer.

Korea Utara terus memperkuat kekuatan pasukan militernya. Korea Utara mempersiapkan dan memberangkatkan pasukan mata - mata dan gerilya ke Selatan untuk melakukan berbagai pengintaian dan aktivitas teroris. Pada bulan Januari 1968, 31 pasukan Gerilya Korea Utara berhasil masuk ke dalam ibukota Seoul dan menyerang *Blue House*, yang merupakan Kediaman presiden Korea Selatan.²⁶

Pada tanggal 1 Maret 1969, Korea Selatan dibawah Kepemimpinan Park Chung Hee mendirikan Kementerian Unifikasi Korea (*Ministry of unification*). Kementerian ini dibuat untuk bertanggung jawab atas koordinasi dialog antara kedua Korea dan usaha reunifikasi Korea. Kementerian ini juga berfungsi mengkoordinasi kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Kementerian ini menganalisis mengenai aspek politik, sosial-ekonomi, dan militer Korea Utara. Sebagai badan pemerintah yang dapat berkomunikasi dengan Korea Utara, kementerian unifikasi juga

mendorong terjadinya kerjasama antar-Korea. Baik kerjasama ekonomi, sosial, budaya, olahraga, kemanusiaan dan lainnya. Kementerian juga akan memberikan pengetahuan mengenai unifikasi kepada publik.²⁷

Setelah didirikannya kementerian unifikasi dan beberapa penyerangan Korea Utara di masa lampau, upaya reunifikasi dan rekonsiliasi di antara kedua Korea dimulai pada tahun 1971. Di bulan Agustus tahun 1971, Korea Selatan memprakarsai adanya pembicaraan antara Palang Merah Nasional Republik Korea dan Palang Merah Korea Utara untuk membahas mengenai isu kemanusiaan keluarga yang terpisah.²⁸ Pada akhirnya, Korea Utara dan Korea Selatan mengumumkan adanya pernyataan bersama di tanggal 4 Juli 1972. Hal ini merupakan suatu langkah kemajuan dari hubungan kedua Korea yang menuntun ke dalam usaha penyatuan kembali semenanjung Korea.²⁹ Beberapa hal penting dari pernyataan bersama itu adalah:

1. Reunifikasi akan berlangsung tanpa ketergantungan pada atau intervensi oleh bangsa asing dan reunifikasi akan dicapai dengan sarana damai.
2. Kedua belah pihak harus mengambil langkah - langkah untuk menghentikan propaganda melawan satu sama lain, menghentikan agresi militer dan mencegah terjadinya bentrokan militer.

²⁷ Ministry of unification, *About MOU*, (diakses pada 3 November 2014); dapat diakses di <http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1826>

²⁸ Ministry of unification Republic of Korea, *Op.Cit.*, 1996, hal. 18-19

²⁹ Ministry of unification Republic of Korea, *Op.Cit.*, 1996, hal. 19

3. Kedua belah pihak harus melakukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta bekerja sama dalam mewujudkan pembicaraan antar Palang Merah Korea, membuka jalur telekomunikasi diantara Seoul dan Pyongyang, dan membentuk sebuah komite mediasi antara utara dan selatan.³⁰

Pada tahun 1988, Presiden Roh Tae Woo mengeluarkan suatu kebijakan yang bernama Nordpolitik. Kebijakan Nordpolitik Korea Selatan adalah kebijakan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara Komunis manapun termasuk China dan Korea Utara. Hal ini mendapat dukungan dari negara aliansi nya Amerika Serikat. Strategi kebijakan luar negeri Roh Tae Woo terhadap Korea Utara yaitu untuk menjalin hubungan diplomatik dari berbagai aspek.

Iklim Internasional mendukung dilaksanakannya kebijakan *Nordpolitik*. Uni Soviet dan Eropa Timur yang sedang mengalami reformasi itu menerima baik tawaran investasi Korea Selatan dan sepakat untuk membantu mengurangi ketegangan di semenanjung Korea. Akibat hal ini, Hubungan diplomasi antara Moskow dan Pyongyang mendingin ketika Presiden Gorbachev bertemu Presiden Roh di San Fransisco pada tahun 1990. Hal ini menyebabkan aliansi militer keduanya menurun. Moskow mulai mengurangi pengiriman senjata ke Pyongyang kala itu. Pemerintahan Korea Selatan memiliki tujuan tersendiri dalam melakukan kebijakan nordpolitik. Korea Selatan berharap nordpolitik akan membawa pada pengakuan silang (*Cross*

³⁰ Ministry of Unification, *History of Inter-Korean Relations*, (diakses pada 24 Oktober 2014); dapat di akses di <http://www.unikorea.go.kr/content.do?mcid=1806>

recognition) atas kedua Korea oleh empat superpower, China dan Uni Soviet mengakui Korea Selatan sedangkan Amerika Serikat dan Jepang mengakui Korea Utara. Kebijakan ini terbukti sukses karena Korea Selatan secara pesat berhasil membuka hubungan diplomatik dan perdagangan hampir dengan semua negara komunis yang ada baik Eropa Timur, China, Korea Utara.³¹ Pemerintahan Roh Tae Woo (1988-1993) juga menjalankan kebijakan Unifikasi untuk satu komunitas nasional di tahun 1989. Namun, kebijakan tersebut belum berhasil mewujudkan harapan rakyat Korea untuk reunifikasi Korea.

Reunifikasi Jerman di bulan Oktober 1990 sangat mempengaruhi keinginan kuat kedua Korea untuk melakukan reunifikasi. Setelah Uni Soviet dan blok Eropa Timur runtuh pada awal 1990-an, sikap Korea Utara kepada masyarakat dan dunia internasional lebih keras daripada sebelumnya. Korea Utara tidak lagi mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat sosialis internasional. Keadaan perekonomian Korea Utara juga semakin memburuk yang diakibatkan bencana alam yang melanda Utara terus menerus. Korea Utara pun mengambil keputusan bahwa lebih memilih meningkatkan kemampuan militer daripada kesejahteraan rakyat Korea Utara. Korea Utara percaya bahwa jika negara mereka kemampuan militer yang hebat maka negara lainnya akan mengakui kedaulatan dan rejim Korea Utara dan membantu dalam hal ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

³¹ Henry C K Liu, *Part 10: The changing South Korean position*, (di akses pada 3 November 2014) dapat di akses di <http://latimes.com/latimes/Korea/IR07Da01.html>

Di tahun 1990-an, nuklir Korea Utara mulai terdeteksi oleh Amerika Serikat dan satelit komersial Perancis. Secara Geografis, nuklir Korea Utara membuat khawatir negara-negara tetangganya termasuk Korea Selatan. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur mengkhawatirkan bahwa nuklir Korea Utara dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Pemimpin Korea Selatan selanjutnya pun mulai menerapkan kebijakan luar negeri dengan fokusnya adalah Korea Utara.³²

2. Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara di Masa Pemerintahan Sipil.

a. Masa Pemerintahan Kim Young Sam (1993 - 1998)

Ketika Kim Young Sam terpilih menjadi presiden Korea Selatan pada Februari 1993, Kim mengusulkan pertemuan tingkat tinggi antar Korea dan menggunakan segala upaya untuk berunding dengan Korea Utara. Kondisi perekonomian Korea Utara yang merosot membuat Korea Selatan mencoba merangkul Korea Utara. Korea Selatan di bawah kepemimpinan Kim Young Sam berusaha membujuk Korea Utara untuk bergabung dengan masyarakat Internasional dengan lapang dan terbuka. Namun kebaikan presiden Kim Young Sam ternyata malah

membuat keras sikap Korea Utara. Sikap keras itu ditunjukkan dengan diperkuatnya kekuatan militer dan pengembangan senjata militer Korea Utara.

Pada 12 Maret 1993, Korea Utara mengumumkan menolak inspeksi khusus Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terhadap fasilitas nuklirnya di Yongbyeon. Padahal Korea Utara baru mencapai perjanjian pengawasan dengan IAEA di tahun 1992.³³ Keputusan Korea Utara ini membuat Komunitas internasional pun mulai curiga terhadap fasilitas nuklir di Korea Utara. Krisis nuklir di semenanjung Korea pun terjadi akibat penolakan pemberian izin penyelidikan kepada IAEA. Pada tanggal 1 April 1994, IAEA pun memutuskan menyerahkan isu nuklir Korea Utara kepada dewan keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa.³⁴

Pada 11 Mei 1994, Dewan Keamanan PBB mendesak Korea Utara untuk mempertimbangkan kembali posisinya dan memenuhi inspeksi yang di lakukan IAEA.³⁵ Akhirnya, pada 21 Oktober 1994, Amerika Serikat dan Korea Utara menandatangani kerangka perjanjian yang di dukung oleh pemerintah Republik Korea dan masyarakat Internasional. Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat, semua fasilitas nuklir Korea Utara akan terus berada dibawah pengawasan NPT dan menerima inspeksi IAEA. Sementara, sebagai gantinya Amerika Serikat akan menyediakan 2 reaktor air ringan dan minyak solar tiap tahunnya hingga tahun 2003. Krisis nuklir

³³ KBS world Korea, *Kronologi Program Nuklir Korut, Op.Cit.*,

³⁴ Ministry of unification Republic of Korea, *Op.Cit.*, 1996, hal.60

Korea Utara secara bertahap diselesaikan sebagai ketentuan kerangka yang disepakati: Korea Utara dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan bahwa jenis reaktor yang di sediakan untuk Korea Utara akan memenuhi standar Korea dan Organisasi Pengembangan Energi semenanjung Korea (KEDO). KEDO merupakan salah satu organisasi internasional yang dibuat bersama Korea Selatan yang bertanggung jawab untuk membiayai dan menyuplai proyek reaktor air ringan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Korea Utara.³⁶

Selain proyek reaktor air ringan, pemerintahan Kim Young Sam melakukan beberapa kebijakan terhadap Korea Utara yakni yang pertama, dengan adanya pembicaraan 4 negara yaitu Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, dan China. Yang kedua yaitu Adanya pengembangan di antara pertukaran dan kerjasama antara Korea. Yang ketiga adalah pemberian bantuan kemanusiaan yang terfokus pada bantuan makanan. Selama periode september 1995 sampai September 1996, Palang merah Republik Korea telah mengirimkan berbagai makanan yang bernilai sekitar 18 juta dollar Amerika yang termasuk tepung, minyak sayur, susu, dan mie instan.³⁷

Selain mencoba untuk membina hubungan baik dengan Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat yang juga mempunyai ideologi dan market ekonomi yang sama mempunyai aliansi yang kuat dalam keamanan nasional dan kerjasama yang luas di berbagai aspek termasuk bisnis, perdagangan, pengetahuan dan teknologi.

³⁶ Ministry of unification Republic of Korea, *Op.Cit.*, 1996, hal. 60-61

³⁷ Ministry of unification Republic of Korea, *Op.Cit.*, 1996, hal. 61

Pada 17 September 1996, sebuah kapal selam Korea Utara dengan 26 anggota pasukan komando mencoba menyusup ke pantai timur Korea Selatan, tetapi aksi itu kemudian dapat digagalkan. Sebagai akibat dari kejadian itu, ada sekitar 24 orang korban jiwa yang tewas akibat tertembak, seorang tertangkap, dan seorang lagi melarikan diri. Tahun 1998, Korea Utara berhasil melakukan uji coba rudal yang mempunyai jangkauan jelajah 1.700- 2.200 km melewati Jepang dan jatuh di lautan Pasifik. Peluncuran rudal Korea Utara sangat mengkhawatirkan Korea Selatan dan Jepang.³⁸

Di masa Pemerintahan Kim Young Sam juga memiliki kebijakan mengenai reunifikasi Korea. Kebijakan ini merupakan kebijakan reunifikasi pertama yang dilakukan di masa pemerintahan sipil. Kebijakan ini bernama formula unifikasi komunitas nasional Korea. Kebijakan ini juga diikuti jejaknya oleh pemimpin-pemimpin Korea Selatan setelah Kim Young Sam seperti Kim Dae Jung, Roh Moo Hyun dan Lee Myung Bak. Prinsip dari formula unifikasi komunitas Korea yang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian dan demokrasi yang berfungsi untuk mempromosikan pertukaran dan kerjasama antar Korea. Prinsip kemerdekaan bermaksud agar unifikasi seharusnya dicapai pada persetujuan kedua Korea itu sendiri dengan ke hendak rakyat Korea dan pada kekuatan kapabilitas nasional yang inheren. Prinsip perdamaian bermaksud bahwa unifikasi dicapai untuk perdamaian bukan

³⁸ KBS World Korea, *Pengembangan nuklir Korea Utara*, (diakses pada 13 Desember 2014); dapat di akses dari http://world.kbs.co.kr/indonesia/event/korea_nuclear/news_04h.htm

perang. Dan prinsip demokrasi bermaksud unifikasi seharusnya menjadi sebuah integrasi demokratis negara atas dasar kebebasan dan hak-hak seluruh rakyat Korea.³⁹

Formula Unifikasi yang ditawarkan Korea Selatan berbeda dengan Korea Utara.

Tabel 2.1

Perbandingan antara formula unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara

Kategori	Korea Selatan	Korea Utara
Nama Formula	Korea National Community Unification Formula	Formula for Creating a Democratic Confederation of Koryo
Filosofi dasar	Demokrasi Liberal (Human-centred)	Ideologi Juche
Aktor Utama dalam unifikasi	Semua anggota dalam Korea Community	Kelas Proletariat (Kelas sosial bawah)
Prosedur untuk unifikasi	Pemilihan Umum di seluruh Korea di bawah konstitusi unifikasi korea	Serangkaian konferensi politik
Format dari	Satu negara bangsa dengan satu	Konfederasi dua negara

³⁹ Ministry of Unification Republic of Korea, *Korean National Community Unification Formula*, (diakses pada 24 September 2014); dapat diakses dari: <http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1786>

unifikasi Korea	sistem dan satu pemerintahan	masing-masing dengan sistem sendiri dan pemerintah sendiri
Fitur dari Unifikasi Korea	Negara demokrasi maju di mana kebebasan, kesejahteraan, martabat warga individual dihormati	Tidak ada

Sumber: PEACE AND COOPERATION: White Paper on Korean Unification, 1996. Ministry of unification Republic of Korea, hal. 54

b. Masa Pemerintahan Kim Dae Jung (1998 -2003)

Di awal tahun 1998, Korea Selatan mulai di pimpin oleh presiden Kim Dae Jung yang merupakan aktivis dari gerakan pro-demokrasi dan anti- militerisme. Untuk menghadapi Korea Utara yang kala itu terus mengembangkan senjata nuklirnya, pemerintahan Kim Dae Jung menjalankan kebijakan yang lebih bekerjasama dan menggunakan pendekatan yang lebih meyakinkan. Kim Dae Jung menjalankan suatu kebijakan yang dinamakan sinar matahari (*Sunshine Policy*) yang dilakukan dengan cara yang konsisten mengajak Pyongyang masuk ke dalam arena masyarakat internasional. Analisis isi dari kebijakan Kim Dae Jung yaitu selama ini, Korea Utara telah mempertahankan ideologi *Juche* yang telah membuat Korea Utara tertutup ketat dari dunia luar, tidak mau mendengarkan nasehat dari negara lain dan tetap mencari

... dan ini membuat Korea Utara dikenal oleh masyarakat Internasional

sebagai tanah utara yang dingin dan beku.⁴⁰ Pemimpin Korea Selatan ini ingin menyinari Korea Utara dengan sinar matahari yang dimiliki oleh Korea Selatan sehingga Korea Utara bisa mencair dan membaaur di dalam pergaulan internasional.

Kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara terdahulu tidak bisa berlangsung lama, sebab tanggapan pihak Korea Utara selalu negatif. Kalau ada serangan provokatif, kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara akan segera berhenti. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan reunifikasi, Presiden Kim Dae Jung dengan sabar terus menyelenggarakan kebijakan sinar matahari tersebut. Presiden Kim Dae Jung mengetahui bahwa untuk mewujudkan reunifikasi semenanjung Korea tidaklah mudah dan membutuhkan proses dalam menjalankan prosedurnya. Pemerintah Kim Dae Jung memiliki visi untuk mencapai proses reunifikasi Korea secara damai melalui dialog dan bantuan ekonomi. Kebijakan Sinar Matahari ini kemudian lebih mengedepankan kerjasama dan pertukaran perdagangan.⁴¹ Chung Ju-Yong yang melihat kebijakan sinar matahari mempunyai prospek kedepannya ikut membantu terwujudnya kebijakan ini. Chung Ju-Young yang merupakan ketua umum kehormatan grup bisnis Hyundai untuk pertama kalinya membuka pintu air antara Utara dan Selatan. Peran *Chaebol* (Pengusaha) di Korea Selatan terhadap kebijakan negara Republik Korea sangatlah besar. Chung menginjakkan kakinya ke Utara sambil mengemudikan sekitar 500 ekor sapi melewati jalan darat

Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kim Dae Jung ini, Pertemuan puncak yang pertama setelah semenanjung Korea terbagi menjadi dua wilayah berhasil diselenggarakan. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 14-16 Juni 2000 di Pyongyang. Dari pertemuan ini diperoleh deklarasi yang berisi 5 pasal yang membahas mengenai penuntasan masalah reunifikasi Korea.

Poin kunci dalam Deklarasi Bersama 15 Juni Selatan-Utara, dimana Kedua Korea harus:

1. Bekerja sama untuk menyelesaikan penyatuan Korea.
2. Mengenali kesamaan antara usulan Korea Selatan untuk konfederasi dan usulan Korea Utara untuk federasi tingkat rendah dan mengejar unifikasi nasional.
3. Menyelesaikan masalah kemanusiaan dengan memegang reuni keluarga terpisah dan mencari resolusi mengenai tahanan politik.
4. Lebih saling percaya dan mempromosikan pengembangan seimbang dari kedua negara melalui perluasan kerjasama ekonomi bilateral.
5. Mengadakan dialog tingkat pemerintah di masa depan untuk segera diimplementasikan.⁴³

⁴³ BBC News, *North-South Joint Declaration*, (di akses pada kamis, 11 Desember 2014); di akses di:

Sejak Juni 2000, kedua Korea membuat kemajuan dalam hubungan antar-Korea. Mereka telah membuka dialog di berbagai daerah dan mengadakan reuni keluarga terpisah. Proyek mempertemukan keluarga terpisah antara Korea Utara dan Korea Selatan yang termasuk dalam 5 pasal yang disepakati oleh Kim Dae Jung dan Kim Jong Il merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan oleh kedua pemerintahan di semenanjung Korea. Banyak keluarga yang mempunyai keinginan kuat untuk bertemu kembali dengan keluarga mereka yang terpisah. Menurut kesepakatan itu, dalam tahap pertama, sebanyak 100 orang yang terpisah dengan keluarganya mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke masing - masing pihak lawan. Pertemuan itu dilaksanakan di ibukota Seoul dan di Pyongyang pada tanggal 15 Agustus 2000. Usaha itu sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1971 lalu oleh Palang Merah Korea Utara dan Korea Selatan. Akan tetapi, usaha itu hanya berhasil dilakukan satu kali di tahun 1985. Pada tahun 1985, masing-masing pihak hanya dapat mempertemukan rombongan 100 orang yang terpisah.

Sejak pertemuan puncak dilakukan, pertemuan antar palang merah sering diselenggarakan dan saat itu disepakati beberapa hal yang memuaskan. Di antaranya proyek mempertemukan keluarga terpisah terjadi dua kali di tahun 2000, mendirikan kantor dan tempat bertemu keluarga terpisah yaitu di kota perbatasan Panmunjom dan gunung Geumgang. Dalam waktu bersamaan, Pemerintah Seoul memutuskan untuk mengembalikan mantan mata - mata Korea Utara ke negaranya yang ditangkap saat ketahun menyusun ke bagian Selatan

Strategi Kebijakan Matahari Kim Dae Jung dapat memperbaiki hubungan yang lebih baik antar kedua Korea dengan memisahkan ekonomi dan politik serta mengizinkan perusahaan-perusahaan perorangan di Korea Selatan untuk menanamkan modalnya di Korea Utara dan mempromosikan proyek - proyek yang didasarkan atas prinsip timbal balik yang saling menguntungkan.

Melalui pertemuan puncak di Pyongyang, Presiden Dae Jung dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-Il sepakat untuk menghubungkan jalur kereta api antar-Korea yang selama setengah abad ini telah terputus. Kebijakan ini berarti menghubungkan jalur utama di semenanjung Korea sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas dari Seoul, Ibukota Korea Selatan ke Sinuiju, kota perbatasan Korea Utara dan RRC. Penyambungan kembali jalur kereta api ini dinamakan "Jalur sutra Baru Melalui Rel Kereta Api" Penghubungan kembali kereta api itu sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi kedua Korea.⁴⁴

Dalam bidang pertahanan, Sebelum diadakannya pertemuan tahun 2000, Kedua belah pihak Korea selama ini saling bermusuhan keras dan mereka selalu mengincar satu sama lainnya. Pertempuran laut yang keras antara Angkatan Laut Korea Selatan dan Korea Utara juga terjadi beberapa bulan sebelum pertemuan puncak antar Korea diadakan. Menteri pertahanan Korea Selatan Chong Sung-Tae dan rekannya di Korea Utara Kim Il-Cheol melakukan pertemuan di pulau Jeju, Korea

⁴⁴ Yang Seung Yoon dan Mochtar Maso'ed, *Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea sebuah pengantar*. (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2003)

Selatan untuk merundingkan masalah - masalah kemiliteran antara kedua Korea. Berdasarkan deklarasi antar-Korea yang disepakati oleh kedua kepala pemerintahan, para pemimpin bidang pertahanan pun mencoba memperlihatkan usaha mereka untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan saling kepercayaan. Untuk itu, kedua belah pihak Korea menyetujui untuk saling menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lawan apabila akan mengadakan latihan militer dan pergerakan yang besar. Menteri pertahanan juga sepakat untuk bekerjasama dalam proyek rel kereta api karena proyek itu dilaksanakan di dalam daerah bebas militer yang mana terdapat banyak fasilitas pertahanan dan ranjau darat⁴⁵. Selain bidang ekonomi, pertahanan, isu kemanusiaan, kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara juga terjadi dalam hal sosial, budaya dan olahraga.

Walaupun di masa pemerintahan Kim Dae Jung mengutamakan kerjasama dengan Korea Utara. Namun, disamping itu Korea Selatan juga tetap mencoba menyelaraskan kebijakan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Dalam hal ini, *Sunshine Policy* berpengaruh terhadap hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan, sebagai contoh Amerika Serikat bersedia menarik mundur pasukannya dari zona DMZ, akibat adanya pernyataan kedua kepala negara bahwa kedua pihak sepakat bahwa tujuan mendasar dari penarikan tersebut adalah meningkatnya keamanan semenanjung Korea dan meningkatkan pertahanan bersama.

⁴⁵ Dessy Fathimatuzzahrah dan Leo Agung S, *Jurnal Upaya Reunifikasi Korea (Studi tentang*

c. Pemerintahan Roh Moo Hyun (2003-2008)

Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun, Roh memperkenalkan kebijakan perdamaian dan kemakmuran. Kebijakan ini mencoba untuk membangun pencapaian di pemerintahan sebelumnya.⁴⁶ Roh Moo Hyun lebih percaya diri pada kemampuan politik luar negerinya untuk menyelesaikan krisis dengan perdamaian. Pemerintahan Roh Moo Hyun melaksanakan kebijakan ini berdasarkan pada tiga hal pokok, yaitu tetap melakukan kebijakan sinar matahari, terus memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat Korea Utara dan akan menjalankan kebijakannya terhadap Korea Utara secara terbuka. Keterbukaan tersebut diartikan agar masyarakat Korea mengetahui usaha penyatuan yang diupayakan oleh presiden Korea Selatan bahkan menginginkan agar rakyat Korea mau membantu dalam upaya reunifikasi Korea.⁴⁷

Kebijakan ini berfokus untuk resolusi perdamaian terhadap isu keamanan di semenanjung Korea, dimulai dari isu nuklir Korea Utara dan dalam jangka panjang, berusaha untuk membangun rezim perdamaian yang permanen dan membentuk masyarakat ekonomi antar korea sementara itu berusaha untuk membuat kerjasama rezim untuk perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur.

⁴⁶ Ministry of Unification, *Chapter 1 Promoting the Policy of Peace and Prosperity*, 1995,

hal.13

⁴⁷ Yang Seung Yoon dan Mochtar Maso'ed, *Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea sebuah pengantar*, *Op.Cit.*, hal. 122-123

Kebijakan perdamaian dan kemakmuran dimulai karena beberapa alasan. Pertama, kebanggaan nasional dan rasa percaya diri yang telah meningkat selama bertahun-tahun melalui pembangunan ekonomi dan demokratisasi. Pertumbuhan ekonomi selama 1960-an dan 1970-an, demokratisasi pada 1980-an, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi pada 1990-an, pemulihan dari krisis devisa di akhir 1990-an, dan penyelenggaraan sukses Piala Dunia 2002 memiliki kontribusi untuk meningkatkan kekuatan nasional dan kepercayaan dari orang-orang Korea. Kenaikan tersebut dalam status nasional dan kepercayaan publik dapat dianggap bahwa Korea Selatan bisa berperan dalam membawa era perdamaian dan kemakmuran ke Asia Timur Laut dan membuat promosi Kebijakan Perdamaian dan Kemakmuran mungkin.

Kedua, pencapaian kebijakan pemerintahan sebelumnya terhadap Korea Utara telah menciptakan kesempatan untuk mengambil hubungan antar-Korea ke tingkat berikutnya.

Ketiga, mengingat bahwa masalah semenanjung Korea semakin menjadi isu internasional, adanya kebutuhan untuk memperluas lingkup kebijakan dari hubungan antar-Korea ke seluruh wilayah Asia Timur Laut. Secara khusus, masalah nuklir Korea Utara, yang telah muncul sebagai masalah keamanan serius sejak Oktober 2002, telah menunjukkan bahwa pembentukan perdamaian di semenanjung Korea sangat penting

4. Kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama tentang perlunya tindakan untuk mengakhiri sistem gencatan senjata yang berlaku hingga saat ini dan membangun rejim perdamaian yang permanen.

5. Korea Selatan dan Utara sepakat untuk memudahkan, meningkatkan, dan lebih mengembangkan proyek kerjasama ekonomi antar Korea secara berkesinambungan agar perkembangan ekonomi yang berimbang dan kemakmuran bersama di semenanjung Korea dapat tercapai berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama.

6. Kedua Korea setuju untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama dibidang sosial-budaya yang mencakup sejarah, bahasa, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, seni, dan olahraga untuk menyoroti sejarah panjang dan keunggulan budaya bahasa Korea. Kedua Korea melakukan program pariwisata gunung Baekdu dan membuka layanan penerbangan langsung antara Seoul dan gunung Baekdu. Kedua Korea juga setuju untuk mengirim pendukung (suporter) bersama dalam olimpiade Beijing di tahun 2008 lewat jalur kereta Gyeongui.

7. Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk mempromosikan proyek kerjasama kemanusiaan secara aktif. Kedua Korea sepakat untuk meningkatkan reuni anggota keluarga yang terpisah dengan melakukan pertukaran pesan lewat video

8. Meningkatkan kerjasama untuk mempromosikan keharuman bangsa Korea di panggung internasional.⁴⁸

Di masa pemerintahan Roh Moo-Hyun, Korea Selatan sedikit demi sedikit melepaskan diri dari intervensi asing, termasuk dalam hal menyelesaikan konflik dengan Korea Utara.

d. Pemerintahan Lee Myung Bak (2008 - 2013)

Lee Myung Bak terpilih menjadi presiden Korea Selatan yang ke 10. Terpilihnya Lee Myung Bak di tahun 2008 telah membawa perubahan bagi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Lee Myung Bak menunjukkan sikap politik yang berbeda dari pendahulunya dalam menyikapi Korea Utara. Pemerintahan Lee sangat menentang program nuklir Pyongyang dan meminta percepatan denuklirisasi semenanjung Korea.⁴⁹ Lee Myung Bak mempunyai kebijakan tersendiri terhadap Korea Utara yaitu kebijakan bernama *Policy of Mutual Benefits and Common Prosperity*. Kebijakan Lee ini di dasarkan atas keuntungan dan kemakmuran Korea bersama. Ini merupakan alat untuk pengimplikasian 3000 visi untuk denuklirisasi nuklir Korea Utara dan keterbukaan antar Korea.⁵⁰ Ada 3 visi dari kebijakan ini yakni

⁴⁸ KBS World Radio, (di akses pada 3 November 2014), dapat di akses di http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/summit_2007/sub_02c.htm,

⁴⁹ Alisher Khamidov , *SAIS U.S. Korea Yearbook 2008*, Johns Hopkins University, 2008. Hal.23

⁵⁰ Suh Jae Jean , *The Lee Myung-bak Government's North Korea Policy- A Study on its Historical and*

denuklirisasi, dialog dan kerjasama dalam mengatasi isu kemanusiaan. Korea Selatan menghimbau Korea Utara untuk menutup program nuklirnya dan diganti dengan proyek yang lebih menguntungkan untuk kesejahteraan kedua Korea. Namun, Korea Utara menolak untuk bekerja sama dan memilih provokasi militer terhadap Korea Selatan.

Sejak awal pemerintahan Lee Myung Bak, Korea Utara menganggap kebijakan luar negeri milik Lee berniat melakukan konfrontasi kepada Korea Utara dan Korea Utara pun menolak untuk membangun hubungan baru antar Korea. Korea Utara menolak adanya visi 3000 inisiatif yang di keluarkan oleh pemerintahan Lee. Korea Utara juga secara sepihak menunda adanya dialog antar-Korea dan terus membuat serangan verbal terhadap pemerintahan Korea Selatan seperti melakukan penembakan kepada wisatawan Korea Selatan gunung Geumgang. Hal ini membuat kerjasama pariwisata gunung Geumgang yang di lakukan pertama kali di masa pemerintahan Kim Dae Jung terganggu. Wisatawan pun mulai berkurang untuk mengunjungi gunung yang terkenal dengan keindahannya itu. Korea Utara juga melakukan pelarangan melintasi perbatasan antar-Korea dan melakukan penahanan kepada seorang pekerja Korea Selatan di kompleks industri Gaeseong. Meskipun mendapat peringatan dari Korea Selatan dan komunitas internasional, Korea Utara tetap meluncurkan uji rudal dan percobaan senjata nuklir yang kedua kalinya.⁵¹

⁵¹ Ministry of Unification Republic of Korea, *Chapter 1. Establishing Principled Inter- Korean Relations*, hal.16, dapat di akses di <http://eng.unikorea.go.kr>

Akibat banyaknya perlawanan dan serangan dari pihak Korea Utara ke wilayah Korea Selatan, Lee Myung Bak pun ingin lebih memperhatikan keamanan wilayah Korea Selatan. Keamanan dan aliansi militer dengan Amerika menjadi prioritas di masa Lee Myung Bak menjabat. Lee Myung Bak lebih giat melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat dengan tujuan untuk menjaga wilayah Korea Selatan dari ancaman pihak luar. Dalam bidang ekonomi, Di bawah kepemimpinan mantan CEO Hyundai ini, Korea Selatan berhasil menjadi ketua G-8 dan tuan rumah dari G-20. Kerjasama militer dengan Amerika Serikat dan kesuksesan Korea Selatan dalam hal ekonomi membuat Korea Utara melakukan provokasi kembali yang tidak bisa di lupakan oleh masyarakat Korea Selatan yaitu dengan menghancurkan *Cheonan*, sebuah kapal angkatan laut milik Korea Selatan di bulan maret 2010. Korea Utara juga menyerang pulau Yeonpyeong dengan cara menembaki dan membunuh tentara dan masyarakat Korea Selatan di pulau Yeonpyeong pada bulan November 2010.⁵²

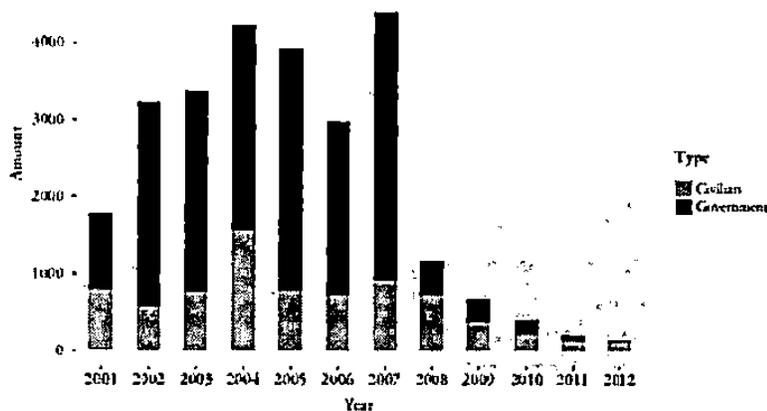
Akibat banyaknya provokasi Utara terhadap Selatan, Lee Myung Bak pun melakukan pengurangan bantuan untuk Korea Utara. Pada akhirnya total bantuan yang diberikan untuk Korea Utara juga semakin berkurang tiap tahunnya.

Gambar 2.1

⁵² Park Geun Hye, *Op.Cit.*,

**Grafik Bantuan Korea Selatan untuk Korea Utara dari tahun 2001 - 2012:
Masyarakat dan Pemerintah (dalam 100 Juta Won)**

Figure 1. South Korean Aid to North Korea 2001-2012:
Civilian and Government (in 100 Million Won)



Source: The Ministry of Unification

Sumber: Issue Brief No.58 dari The Asan Institute for Policy studies, 10 Juni 2013 oleh: Go Myong-Hyun, di akses pada 24 September 2014, Hal. 2

Dapat dilihat di grafik yang ada di dalam gambar, bahwa total bantuan yang di berikan ke Utara di masa pemerintahan Lee Myung Bak sangat jauh berbeda total bantuan yang diberikan pada pemerintahan sebelumnya. Dan semakin menurun, setelah terjadi runtuhnya publik di tahun 2009 serta insiden yang terjadi di tahun 2010

B. Kendala yang di hadapi Korea Selatan ketika menjalankan kebijakan Luar Negeri terhadap Korea Utara

1. Perkembangan Nuklir Korea Utara

Kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara biasanya selain bertujuan untuk kebijakan reunifikasi dan perdamaian juga bertujuan untuk masalah denuklirisasi Korea Utara. Keinginan Korea Selatan untuk melucutkan senjata nuklir Korea Utara karena untuk melindungi kawasan Korea Selatan yang secara geografi sangat dekat dengan Korea Utara. Korea Selatan juga ingin mewujudkan daerah bebas nuklir di semenanjung Korea dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.

Berbagai cara untuk mewujudkan denuklirisasi Korea Selatan hingga sekarang belum ada yang berhasil. Fasilitas nuklir Korea Utara malah semakin berkembang tiap tahunnya. Nuklir Korea Utara yang pada awalnya di rahasiakan oleh pemerintah Korea Utara berubah menjadi secara tegas diakui di bulan Oktober 2002. Hal ini dilakukan untuk menakuti-nakuti negara sekitarnya dan untuk mendapat bantuan ekonomi. Korea Utara bahkan mengundurkan diri dari kesepakatan Non Proliferasi Nuklir (NPT) pada tahun 2003 padahal Korea Utara sepakat bergabung di program NPT sejak tahun 1985. NPT adalah suatu kesepakatan yang berisi tentang pelaksanaan dalam perkembangan dan kepemilikan senjata nuklir sebagai senjata

pemusnah massal. Korea Utara mengakhiri kesepakatan itu karena menilai bahwa NPT tidak bisa melindungi keamanan dan mengakui kedaulatan Korea Utara.⁵³ Banyak negara yang menginginkan program nuklir Korea Utara untuk segera dihentikan karena telah melanggar ketentuan internasional seperti perjanjian non- proliferasi nuklir (NPT), *International Atomic Energy Agency (IAEA), Safeguard Agreement, North - South Joint Declaration on Denuclearation* dan *the Agreed Framework* . Korea Selatan telah membentuk dan ikut dalam perundingan enam negara yang memang di buat untuk menghentikan nuklir di Korea Utara. Perundingan enam negara yang diikuti oleh Amerika Serikat, Korea Utara, Cina, Jepang, Rusia, dan Korea Selatan ini dimulai sejak tahun 2003. Berbagai tekanan datang dari organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dan negara adidaya seperti Amerika Serikat. PBB bahkan memberi sanksi embargo ekonomi dan militer terhadap Korea Utara di tahun 2009 sesuai dengan bab tujuh dari piagam PBB yang mengatur perihal ancaman ketentraman dan tindakan untuk melakukan agresi akibat fasilitas nuklirnya yang semakin berkembang. Akibat mendapat sanksi itu, Korea Utara mengundurkan diri dari perundingan enam negara. Akhirnya, *Six Party Talk* yang guna membahas dan mendukung usaha untuk denuklirisasi kepemilikan program nuklir Korea Utara pun tidak membawa kedua Korea melintasi jalan cerah penyelesaian krisis nuklir di semenanjung Korea. Dewan Keamanan Perserikatan bangsa - bangsa pun kembali menyetujui pemberian sanksi ekonomi terhadap Korea Utara sebagai balasan atas

keberhasilan peluncuran satelit ke orbit rendah bumi pada tanggal 12 Desember 2012.⁵⁴

2. Sikap pemimpin Korea Utara dan provokasi nya terhadap Korea Selatan

Sikap Pemimpin Korea dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan. Baik masa Kim Il Sung, Kim Jong Il dan Kim Jong Un tetap berpegang pada ideologi *Juche* yang telah mengakar berpuluh-puluh tahun di Korea Utara. Ideologi *Juche* mengajarkan negara Korea Utara harus berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Ideologi ini di terapkan pertama kali oleh Kim Il-Sung lalu diterapkan oleh anak dan cucunya sebagai pengganti pemegang kekuasaan di Korea. Pemimpin Korea Utara yang keras kepala untuk tidak ingin bergabung dengan masyarakat Internasional membuat Korea Selatan sulit untuk merangkul Korea Utara dengan kebijakan luar negeri terhadap Utara. Kepercayaan bisa dibangun jika ada norma dan nilai yang sama-sama di patuhi. Pemimpin Korea Utara hanya menghormati kekuasaan dan sama sekali tidak menghormati norma dan nilai-nilai yang dipatuhi oleh negara-negara yang ada di lingkungan internasional. Dari pandangan Korea Utara, hukum dan institusi Internasional tidak memberikan keuntungan bagi Korea Utara Kedua hal itu hanya merupakan alat kekuasaan untuk

⁵⁴ Asia Pasific Defense, *Ancaman Korea Utara sasar Korea Selatan*, (Di akses pada 9 Oktober 2014); 20 Januari 2012 dapat di akses di <http://indforum.com/id/article/rmian/articles/online/features>

mencapai tujuan.⁵⁵ Setiap ada kebijakan yang tidak sesuai keinginan juga dibalas Korea Utara dengan jalur keras yaitu dengan adanya provokasi serangan maupun ancaman untuk pemerintahan Korea Selatan yang sedang berjalan. Walaupun mendapat peringatan dan sanksi dari Korea Selatan, komunitas internasional atau organisasi Internasional seperti PBB, pemimpin Korea Utara tetap mengambil sikap sesukanya. Berulang kali Korea Utara mendapatkan bantuan ekonomi agar kegiatan nuklirnya dapat dihentikan tapi tetap saja Korea Utara tetap melanjutkan kegiatan nuklirnya. Pada akhirnya keinginan adanya reunifikasi mungkin bisa diraih jika ada peristiwa luar biasa yang berkaitan dengan rezim kepemimpinan di Pyongyang. Pemimpin Korea Utara selama ini tidak suka dengan Korea Selatan yang berideologi liberal demokratis yang terlihat tunduk pada Amerika Serikat.

Tidak seperti para pemimpin Korea Utara sebelumnya, Pemimpin Korea Utara di masa pemerintahan Park Geun Hye tidak dapat di prediksi. Kim Jong Un memang belum pernah memegang kekuasaan di pemerintahan. Kim Jong-Un yang mengambil alih kekuasaan secara mendadak di bulan Desember 2011 lebih tidak stabil dan tidak dapat di prediksi. Baik Kim Jong-Il dan Kim Il-Sung pun lebih berhati - hati dalam memprovokasi Korea Selatan dan Amerika Serikat.

⁵⁵ Dean Ouellette, *Building Trust on the Margins of Inter-Korean Relations: Revitalizing the Role of*

3. Kurangnya kepercayaan di antara kedua Korea

Perang Korea yang terjadi di tahun 1950 hingga 1953 telah menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan antara Korea Utara. Serangan-serangan provokasi dari Korea Utara dilancarkan di akibatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Korea Selatan. Korea Utara melakukan berbagai provokasi dan mengembangkan nuklirnya untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan rejimnya. Berbagai Kebijakan luar negeri dari berbagai macam pergantian pemerintahan di Korea Selatan yang ditujukan untuk Korea Utara itu tidak akan berhasil jika Korea Utara terus melakukan provokasi dan selalu curiga kepada Korea Selatan. Kecurigaan di antara Utara dan Selatan semakin berlanjut dengan mengirimkan mata - mata di daerah lawan setelah perang Korea usai. Krisis kepercayaan semakin memuncak lagi saat kapal patroli *Cheonan* Korea Selatan tenggelam di laut kuning pada 26 Maret 2010. 46 pelaut menjadi korban jiwa dari peristiwa ini. Korea Utara tidak mau mengakui atas kehancuran kapal angkutan laut milik Korea Selatan. Sedangkan Korea Selatan sangat yakin bahwa yang menghancurkan kapal *Cheonan* adalah pihak Utara Karena sesuai investigasi menyimpulkan kapal selam Korea Utara menembak kapal *Cheonan* dengan torpedo. Serangan Korea Utara dilanjutkan dengan penembakan 170 artileri (meriam) granat dan roket dekat dengan perbatasan wilayah maritim antar Korea. Serangan ini mengakibatkan 2 pasukan Korea Selatan dan 2 penduduk meninggal dunia dan 15

orang lainnya terluka.⁵⁶ Korea Utara pun dikenai sanksi 24 mei karena tidak ada pertanggung jawaban atau pengakuan terhadap insiden tersebut. Ketidakpercayaan ini akan semakin berlanjut jika tidak ada peran dan sikap dari kedua Korea untuk mencoba saling percaya satu sama lain dan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak akan berhasil dengan sempurna jika Korea Utara tidak mempercayai apa yang dilakukan negara tetangganya itu.

⁵⁶ Korea.net, *Inter-Korea Relations*, (di akses pada 21 Oktober 2014); dapat di akses di <http://www.korea.net/AboutKorea/>